

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MITIGASI TERHADAP BENCANA TSUNAMI PADA DESTINASI WISATA PANTAI DI KABUPATEN BANTUL

Muhammad Fatkhurrahman<sup>1</sup> dan Rizky Septiana Widyaningtyas<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menyediakan infrastruktur mitigasi terhadap bencana tsunami pada destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam merespon kendala tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden serta dilakukan pula pengamatan secara langsung terhadap situasi terkini infrastruktur yang di peruntukan dalam upaya mitigasi terhadap bencana tsunami pada destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan perannya dalam menyediakan infrastruktur mitigasi terhadap bencana tsunami pada destinasi wisata pantai, diantaranya adalah penyediaan rambu-rambu evakuasi, penyiapan tempat evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini yang berbasis *Bantul Integrated Sirine System*, pemasangan radar tsunami di Pantai Parangtritis atas kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pemerintah Jepang, serta penanaman *mangrove*. Kendala yang dihadapi antara lain belum adanya alat yang dapat memprediksi kapan terjadinya gempa bumi sebagai faktor penyebab tsunami, serta lokasi radar yang dekat dengan tempat parkir pengunjung dimana pada musim tertentu sangat ramai pengunjung. Upaya yang dilakukan atas kendala tersebut adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem peringatan dini, mengadakan pelatihan gladi tsunami, sosialisasi penanggulangan bencana serta pemasangan pagar yang dilapisi kawat berduri di sekitar radar tsunami ditambah adanya papan peringatan bagi wisatawan agar tidak merusak atau mengganggu sistem radar.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Infrastruktur, Mitigasi, Tsunami, Pantai, Pariwisata, Kabupaten Bantul.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF BANTUL REGENCY IN PROVIDING MITIGATION INFRASTRUCTURE FOR THE TSUNAMI DISASTER AT THE BEACH TOURISM DESTINATIONS IN BANTUL REGENCY***

Muhammad Fatkhurrahman<sup>3</sup> and Rizky Septiana Widyaningtyas<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine, examine and describe the role of the Bantul Regency Government in providing mitigation infrastructure for the tsunami disaster at the beach tourism destinations in Bantul Regency as well as the obstacles faced and the efforts made by the Bantul Regency Government in responding to these obstacles.*

*This study is an empirical normative study and is descriptive. The data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was gotten directly through interviews with informants and respondents and made direct observations of the current situation of infrastructure designated for mitigation efforts against the tsunami disaster in the beach tourism destinations in Bantul Regency. While secondary data obtained through literature studies.*

*The results show that the Local Government of Bantul Regency has played its role in providing mitigation infrastructure for the tsunami disaster at the beach tourism destinations, including the provision of evacuation signs, preparation of evacuation sites, provision of an early warning system based on the Bantul Integrated Siren System, installation of tsunami radar at Parangtritis Beach in collaboration with the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) and the Government of Japan, and also planting mangroves. Obstacles encountered include there is no tool that can predict when an earthquake will occur as a factor causing a tsunami and the location of the radar which is close to the visitor parking lot where in certain seasons it is very crowded with visitors. Efforts have been made to address these obstacles by periodically checking the early warning system, holding tsunami rehearsal training, socializing disaster management and installing fences lined with barbed wire around the tsunami radar plus a prohibition board to damage or interfere with the radar system.*

**Keywords:** *Local Government, Infrastructure, Mitigation, Tsunami, Beach, Tourism, Bantul Regency.*

---

<sup>3</sup> Administrative Law Student, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>4</sup> Administrative Law Lecturer, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta